

DILEMA NEGARA KOLONIAL: SEKSUALITAS DAN MORALITAS DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD XX

THE COLONIAL STATE DILEMMA: SEXUALITY AND MORALITY IN THE EARLY 20th CENTURY DUTCH INDIES

Gani A. Jaelani

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
Jln. Raya Bandung Sumedang KM.21
e-mail: gani.jaelani@unpad.ac.id

Naskah Diterima: 5 Desember 2018

Naskah Direvisi: 8 Februari 2019

Naskah Disetujui: 27 Maret 2019

DOI: 10.30959/patanjala.v11i1.468

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi persoalan seksualitas di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Perdebatan tentang seksualitas, dalam bentuk praktik pergundikan dan pengaturan pelacuran, selalu saja dikaitkan dengan persoalan moralitas. Kenyataan bahwa pemerintah kolonial pada satu periode memperbolehkan dua aktivitas ini dan melarangnya di periode yang lain merupakan contoh betapa otoritas kolonial tidak pernah memiliki penilaian yang sama terkait permasalahan ini. Hal ini disebabkan oleh adanya tegangan antara kepentingan ekonomi dan semangat pemberadaban dari kolonialisme. Memperbolehkan praktik pergundikan dan pelacuran akan memberi kesan bahwa pemerintah bersekutu dalam laku amoral, sementara larangan terhadapnya akan menjadi ancaman buat kepentingan ekonomi kolonial. Artikel ini akan mencoba menganalisis dilema yang dihadapi otoritas kolonial terkait masalah ini; apa yang membuat penilaian pemerintah selalu berubah; terakhir, artikel ini juga akan menunjukkan satu studi kasus terkait persoalan dilema moral ini.

Kata kunci: Hindia Belanda, kolonialisme, pelacuran, pergundikan, seksualitas.

Abstract

This article seeks to elaborate the question of sexuality in the Dutch Indies in the beginning of the twentieth century. The debate about sexuality, particularly in the common practice of the concubinage and the regulation of the prostitution is always linked to the issue of morality. The fact that the colonial government allowed the two activities in one period and prohibited these in other period, was an example to which extent the stance of the colonial authority toward this question changed. This inconsistency arose from the tension between the economic interest and the civilizing mission of the colonialism. Allowing the concubinage and prostitution will create the impression that the government allied to the immoral activity, while prohibiting it will endanger the economic interest of the colonialism. This article will try to analyze the dilemma of the colonial authority regarding this question; the reason why the government change their judgment; and lastly, to discuss this moral dilemma in a specific case.

Keywords: Colonialism, concubinage, Dutch Indies, prostitution, sexuality.

A. PENDAHULUAN

Meskipun bukan satu-satunya alasan, pendapat yang mengatakan bahwa kolonialisme datang dengan semangat mencari bahan mentah untuk

meningkatkan perekonomian cukup umum diterima. Dalam praktiknya, proses ini kemudian ditopang dengan pembentukan negara kolonial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui

penerapan sejumlah regulasi (Comaroff, 1988: 322). Pada tataran wacana, apa yang dilakukan oleh kolonialisme Eropa itu diberi pembenaran dengan adanya semangat pemberadaban, yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat standardisasi perilaku penduduk lokal dengan ukuran yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Para penduduk dari negeri jajahan dianggap para pemalas karena tidak bisa mengikuti cara kerja orang-orang Eropa yang efektif dalam mencari uang (lihat Alatas, 1977). Itulah kenapa di negara-negara jajahan Inggris istilah "*the white man's burdens*" - yang diambil dari puisi Rudyard Kipling - cukup dikenal; di negara-negara jajahan Prancis istilah "*mission civilisatrice*" lebih dikenal; sementara itu, di Hindia Belanda istilah "*ethische politiek*" lebih akrab. Sekalipun menggunakan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, membawa peradaban Eropa ke negara-negara jajahan yang dianggap masih terbelakang. Sebagai pihak yang mencitrakan dirinya paling beradab, maka ia datang dengan anggapan bahwa pihak-pihak di luar dirinya sebagai tidak beradab.

Adanya anggapan yang menyebutkan bahwa pihak lain lebih rendah, kolonialisme juga datang dengan sejumlah nilai-nilai baru yang ingin diterapkan. Para penduduk di negeri jajahan kemudian diminta untuk mengikuti nilai-nilai baru itu supaya bisa dianggap sebagai bagian dari kemajuan (Bertrand, 2007:115-116). Dalam kerangka ini, persoalan-persoalan yang dianggap bisa menghancurkan citra beradab pemerintah kolonial kemudian menjadi suatu ancaman.

Semangat pemberadaban ini kemudian kerap bertentangan dengan kepentingan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam negeri jajahan adalah hal lain yang menjadi tujuan utama kolonialisme itu sendiri. Persoalan pernikahan bagi para pegawai kolonial, misalnya, merupakan subjek yang kerap menjadi perdebatan. Para pegawai itu

disarankan untuk tidak menikah sebab akan menghabiskan banyak biaya; karena gaji mereka kecil, dikhawatirkan mereka akan melakukan korupsi. Untuk itulah kemudian mereka lebih disarankan untuk mengambil gundik-gundik yang berasal dari penduduk lokal sebagai pasangan. Di sini tampak kontras apa yang menjadi semangat moral pemerintah kolonial dan kepentingan kolonialisme itu sendiri.

Demikian, tegangan seperti itulah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Dihadapkan dengan persoalan seperti ini, pemerintah kolonial sering kali bermuka dua. Mereka selalu saja mengalami kesulitan untuk mendamaikan apa yang menjadi tegangan dalam dua kepentingan tadi. Kasus pernikahan, pergundikan, dan pelacuran akan menjadi fokus dalam tulisan ini. Ketiga hal itu terangkum dalam sebuah kerangka yang dinamai sebagai politik seksualitas.

Seksualitas dan moralitas merupakan kata kunci dalam judul yang perlu mendapat penjelasan. Dalam pengertian sederhana, seksualitas adalah sebuah pengaturan dengan siapa seseorang boleh dan tidak berhubungan seks. Pengaturan ini tidak bisa dilepaskan dari prakondisi material yang ada sebagai arena munculnya, seperti persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itulah kenapa aturan dengan siapa seseorang boleh berhubungan seks atau tidak harus selalu dilihat secara politis (Suryakusuma, 1991:7-9). Dalam kasus Hindia Belanda, politik seksualitas ini akan tergambar dengan jelas dari cara bagaimana pemerintah kolonial kerap mengubah kebijakannya dalam persoalan ini. Sementara itu, moralitas dalam tulisan ini dipahami sebagai suatu standar nilai tentang apa-apa yang dianggap baik dan buruk dalam suatu masyarakat. Seksualitas dan moralitas dengan demikian akan dibicarakan dalam kerangka perdebatan tentang apa yang baik dan tidak dalam menjalankan politik seksualitas di sebuah negara kolonial.

Tulisan dengan tema ini bukan sesuatu yang baru. Pertama-tama, tema seksualitas dan moralitas ini pernah dibahas dalam sebuah disertasi tahun 1982, berjudul *Het Indische Zedenschandaal: een koloniaal incident* (Skandal moral di Hindia: sebuah insiden kolonial). Disertasi ini ditulis oleh Gosse Kerkhof dan dipertahankan di Universitas Amsterdam untuk meraih gelar doktor di bidang sejarah. Yang dimaksud dengan “skandal moral” di sini adalah terbongkarnya jaringan pelacuran homoseksualitas yang melibatkan para petinggi politik kolonial. Tema ini juga dibahas oleh Marieke Bloembergen dalam salah satu bab di bukunya yang berjudul *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan* (Bloembergen, 2009) dan artikel berjudul “Being clean is being strong: Policing cleanliness and gay vices in the Netherlands Indies” yang terbit dalam kumpulan tulisan berjudul *Culture and Cleanliness* (Bloembergen, 2011). Dalam ketiga tulisan yang mengulas peristiwa yang sama ini, disebutkan bahwa terbongkarnya jaringan kaum homoseksual di Hindia Belanda pada akhir tahun 1930-an merupakan pukulan telak penguasa kolonial yang selalu mengampanyekan moralitas di kalangan penduduk pribumi.

Tulisan Lisbeth Hesselink yang berjudul “Prostitution: A Necessary Evil, Particularly in The Colonies; Views on prostitution in the Netherlands Indies” juga perlu dikemukakan. Tulisan ini juga merupakan salah satu dari kumpulan tulisan yang terdapat dalam buku *Indonesians Woman in Focus*, terbit tahun 1987. Oleh karena itu tulisan ini pun tidak membahas secara mendetail tentang pelacuran di Hindia Belanda. Kemudian sebagaimana diakui oleh penulisnya, bahwa penelitiannya tentang pelacuran terbatas pada sumber-sumber berbahasa Belanda. Citra yang muncul tentang para pelacur pun merupakan citra pemerintah kolonial. Pandangan masyarakat sendiri terhadap pelacuran merupakan wilayah yang belum terjelajah.

Buku Ann Stoler yang berjudul *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the intimate in Colonial Rule* (2010) membahas persoalan seksualitas di tanah jajahan dalam hubungannya dengan persoalan rasisme. Kebutuhan akan tersalurkannya hasrat seksual bagi para pegawai kolonial di tanah jajahan sering kali berhadapan dengan persoalan rasisme, apabila praktik itu dilakukan dengan orang-orang yang berasal dari ras berbeda. Ketika hal itu terjadi, otoritas kolonial merasa terancam, dan karena itulah pengaturan boleh dan tidak hubungan semacam ini dilakukan selalu berada dalam tegangan.

Sekalipun buku-buku yang disebutkan ini telah sedikit membahas apa yang akan menjadi pokok persoalan dalam artikel ini, perlu disampaikan bahwa belum ada pembahasan yang cukup menyeluruh yang melihat persoalan seksualitas dan moralitas dalam kaitannya dengan pembangunan negara kolonial yang pada akhirnya membuat dilema tersendiri. Tegangan apa yang menjadi kepentingan ekonomi kolonial dan citra negara beradab merupakan sebuah tema yang kerap diabaikan dalam tulisan-tulisan yang pernah ditulis terkait tema ini. Untuk membuat uraian menjadi lebih rinci, pada bagian akhir dari artikel ini juga akan disampaikan sebuah contoh kasus tentang kasus pelacuran di Bandung pada awal abad ke-20. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, yang cenderung membicarakan sesuatu yang umum, bisa mendapat contoh yang konkret dengan memaparkan kasus yang terjadi di Bandung. Atas dasar itulah kenapa kemudian artikel ini menjadi cukup penting untuk ditulis, sebagai ikhtiar mengelaborasi kemungkinan tema baru dalam penulisan sejarah sekaligus juga upaya pencarian bentuk dalam praktik penulisan sejarah Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Sejarah adalah sebuah pengetahuan yang didasarkan pada jejak. Tanpa jejak yang tertinggal dari masa lalu, tidak mungkin sebuah penelitian sejarah dilakukan (Veyne, 1979:15). Persoalan jejak ini, selama berpuluh tahun sering ditafsir sebagai dokumen tertulis semata. Karena itu, pernyataan “tanpa dokumen, tidak ada sejarah” menjadi sebuah diktum yang banyak diimani para sejarawan. Padahal, apa yang disebut sebagai jejak ini bisa mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari yang material - seperti benda, gambar, dan tulisan – sampai dengan yang imaterial - seperti ingatan dan kebiasaan yang muncul dalam keseharian.

Pemahaman bahwa sejarah merupakan sebuah pengetahuan yang didasarkan pada jejak akan mengantarkan pada suatu paradigma yang meletakkan sumber sejarah sebagai sesuatu yang utama dalam penelitian sejarah. Pembangunan sebuah korpus sumber yang dilakukan dengan cara mendefinisikan sumber-sumber apa saja yang akan kita pakai merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Setelah pembangunan sumber itu, pembacaannya secara sistematis juga harus dilakukan untuk menghasilkan informasi apa saja yang bisa didapat. Pembatasan sumber ini juga akan memudahkan pembacaan dan penjelajahan tema-tema sejarah secara lebih sistematis (Marrou, 1975:64–91). Penulisan suatu tema, misalnya, -dalam kerangka itu–selalu saja didasarkan pada pembacaan sistematis sumber tertentu. Oleh karena itu, jika ada peneliti lain yang juga ingin menulis tema yang sama, bisa saja dilakukan jika didasarkan pada pembacaan sumber yang lain.

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, penelitian ini pertama-tama didasarkan pada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para dokter terkait permasalahan moralitas. Perlu disampaikan bahwa para dokter pada masa itu tidak

harus selalu berbicara masalah kesehatan, mereka juga terlibat dalam persoalan-persoalan politik kolonialisme. Itulah kenapa, mengamati persoalan seksualitas dan moralitas dari sudut pandang para dokter ini menjadi sangat penting. Tulisan-tulisan mereka bisa ditemukan dalam jurnal kedokteran *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, *Vragen des tijds*, dan pidato di forum Indische Genotschaps. Selain itu, para dokter ini juga kemudian menerbitkan buku yang didasarkan hasil penelitian dan observasi mereka selama tinggal di Hindia Belanda. Setidaknya itulah yang bisa kita lihat dalam kasus C. L. van der Burg dan J. F. H. Kohlbrugge, Pandangan-pandangan para dokter terkait permasalahan ini, pertama-tama, dilakukan dari sudut pandang kedokteran; pembahasan terkait pelacuran sering dilihat dalam hubungannya dengan penyebaran penyakit kelamin. Sekalipun sesekali membahasnya dari sudut pandang moral dan politik, sudut pandang para dokter memiliki keterbatasan dalam mengulas permasalahan moral dalam sebuah negara kolonial.

Selain pandangan-pandangan ilmiah dan politik dari para dokter, tulisan ini juga didasarkan pada catatan perjalanan dan novel-novel yang diterbitkan sezaman. Catatan perjalanan Henri van Kol, *Uit onze koloniën: uitvoerig reisverhaal* (1903), adalah sumber penting yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari di Hindia Belanda dari sudut pandang seorang anggota parlemen Belanda. Tulisan Bas Veth yang cukup terkenal, *Het Levens in Nederlandsch-Indië* (1900) adalah contoh novel yang banyak membicarakan kehidupan moral di Hindia Belanda. Tulisan ini cukup penting untuk melihat bagaimana persoalan seksualitas dan moralitas dipahami secara umum pada masa itu melalui karya-karya populer. Kedua catatan dari orang Eropa itu, dengan demikian, bisa menambal bagian-bagian yang tidak dibahas oleh para dokter.

Tentu saja apa yang disampaikan oleh para penulis ini tidak bisa digeneralisasi, tapi setidaknya bisa merepresentasikan kecenderungan kebanyakan orang pada masa itu. Melalui catatan orang-orang Eropa itulah tulisan ini akan meneroka persoalan moralitas di Hindia Belanda.

C. HASIL DAN BAHASAN

Awal abad XX merupakan sebuah babak baru dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan *ethische politiek* – politik etis. Dalam bahasa populer, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan politik balas budi. Melalui penerapan kebijakan ini, pemerintah bermaksud mengembalikan kebaikan yang sudah diambil dari bumi Hindia untuk kepentingan penduduk itu sendiri, yang berpusat dalam tiga program utama: Edukasi, Emigrasi, dan Irigasi.

Melalui ketiga bidang tersebut, pemerintah tampak memberi perhatian lebih kepada penduduk pribumi. Melalui pendidikan, misalnya, diharapkan kaum pribumi bisa memperoleh pendidikan barat yang nantinya berguna untuk pembangunan negara kolonial. Pada masa ini, pemerintah juga membentuk apa yang dinamai sebagai “The Welfare Service” (Dinas Kesejahteraan Sosial) yang memiliki tugas untuk memastikan kesejahteraan penduduk. Hal ini bisa dilihat dari adanya pelayanan di bidang pertanian, pelayanan kesehatan, kredit, dan koperasi (Boomgaard, 1986:70–77). Tidak bisa dipungkiri bahwa melalui program-program ini sebetulnya pemerintah kolonial juga mendapat keuntungan.

Kebijakan yang muncul pada periode ini lahir dari adanya cara pandang baru terhadap tanah jajahan. Cara pandang baru yang mewujud dalam sejumlah program tadi, juga memiliki dampak terhadap kemunculan cara pandang baru terhadap realitas sosial. Konsekuensi yang muncul darinya adalah lahirnya standar moral baru. Persoalan-persoalan sosial yang dianggap

sebagai membahayakan program pemerintah untuk kemajuan dan pembangunan negara kolonial dianggap sebagai ancaman. Pemberian bobot moral terhadapnya merupakan cara bagaimana pemerintah melakukan moralisasi atas persoalan-persoalan sosial. Pertanyaan yang kemudian muncul, apa saja yang berubah? Kenapa hal tersebut berubah? Bagaimana meletakkan perubahan tersebut dalam konteks negara kolonial?

1. Seksualitas dan pergundikan

“Het is niet te verwonderen, dat, terwijl de geslachtsdrift in het heete klimaat vermeerderd is, de Europeesche mannen dikwijls hunne sukkelende vrouwen achterstellen bij gezonde, krachtige en gemakkelijk ter dispositie zijnde, inlandsche vrouwen. De produkten zijn dus dan weer kleurlingen en de eigenlijke kolonisatie treedt op den achtergrond”

L. van der Burg

Henri van Kol, seorang anggota Parlemen Belanda, dalam catatan perjalanannya ke Hindia Belanda yang diterbitkan tahun 1903, mengakui

“tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pergundikan para tentara Hindia adalah sebuah keburukan, dan akibat fatal yang muncul darinya tidaklah kecil. Upaya untuk meminimalisir hal itu perlu dilakukan dan merupakan suatu kewajiban (Kol, 1903:768).

Tulisan itu didasarkan atas pengamatannya ketika sedang dalam perjalanan dari Salatiga ke Magelang. Di situlah ia menemukan suatu kelompok sosial yang lahir dari percampuran darah antara orang Eropa dan Pribumi. Anak-anak ini, dalam pandangannya cukup negatif. Van Kol menulis

Orang-orang liar itu telah menciptakan satu jenis kaum proletar yang menyedihkan. Mereka adalah orang-orang miskin yang merupakan dampak

dari kesalahan kita, orang-orang Pribumi dari darah kami [...] Tingkat kemiskinan di antara orang-orang Indo sangat tinggi, kehidupan mereka menyedihkan dan masa depan mereka pun suram. Keturunan ras kulit putih ini bertempat tinggal di ratusan rumah di lingkungan kumuh kota-kota Hindia Belanda kita serta di perkampungan kotor dekat tangsi-tangsi. Karena tidak cocok atau tidak mau melakukan pekerjaan yang jujur, mereka pun hidup sebagai pengangguran di gubuk-gubuk reyot dalam lingkungan bermoral bobrok dan menyambung hidup hanya dengan usaha ilegal. Yang satu berjudi secara diam-diam, yang lain menyelundupkan candu atau mendulang keuntungan dari rumah-rumah bordil serta menjual kehormatan anak perempuannya. Yang lainnya hidup dari mengemis atau memeras. Hanya sedikit yang berhasil mencari makan dengan cara yang baik (dalam Baay, 2010:172)

Tulisan ini menyiratkan sebuah penilaian terkait keberadaan orang-orang yang lahir dari percampuran dua ras yang dianggap sebagai ancaman moral terhadap masyarakat. Selain anak-anak, Van Kol juga mencatat apa yang kemudian terjadi pada orang tua, terutama para ayah mereka. Ada kasus seorang ayah yang menelantarkan anaknya kemudian pergi tenggelam dalam alkohol. Kasus lain adalah seorang ayah yang terus hidup dalam kehidupan *libertin* dan akhirnya terkena penyakit sifilis yang membuat akalannya terganggu. Ada juga yang menjadi gila, sementara yang lain melakukan upaya bunuh diri (Kol, 1903:769). Itu adalah gambaran yang dihasilkan dari pengamatan sang anggota parlemen.

Persoalan pergundikan memang bukan sesuatu yang baru. Sejak kedatangan orang Belanda pertama kali ke Hindia Timur pada abad ke-17, hal ini sudah menjadi persoalan negara. Pada masa itu, bukan negara betul, memang, yang disibukkan oleh soal ini, karena negara

belum juga lahir. Tapi dari kecemasan J.P. Coen, si Gubernur Jenderal kedua VOC itu, yang tampak dalam surat yang dikirimnya kepada *Heeren XVII*, bos VOC, jelas seksualitas merupakan persoalan politik yang gayut dengan persoalan ekonomi.

Coen yang datang menggantikan Peter Both sebagai Gubernur Jenderal, dalam suratnya itu, mengusulkan supaya didatangkan perempuan baik-baik untuk dijadikan istri para pegawai VOC ditolak oleh *Heeren XVII* (Blussé, 2004:298). Berkaitan dengan penolakannya, *Heeren XVII* mempunyai sejumlah alasan untuk tidak mengabulkan usulan-usulan Coen. Pertama, pasangan keluarga yang datang ke Hindia dikhawatirkan hanya akan bertujuan memperkaya diri. Memang saat itu Hindia terkenal sebagai tempat pelarian pengusaha yang mengalami kebangkrutan di Eropa. Pasangan yang telah mendapat keuntungan banyak kemudian lari ke Belanda. Pada titik ini *Heeren XVII* merasa sumber-sumber perekonomiannya terancam.

Kedua, sejalan dengan itu pengiriman wanita lajang ke Hindia juga membutuhkan biaya besar. Biaya ini tidak sebanding dengan keuntungan yang bakal diperoleh. Selain itu kekhawatiran pasangan Eropa yang menikah tidak lagi mengabdikan pada perusahaan juga terus dijadikan alasan. Mereka yang telah menikah akan memperkaya diri sendiri, sedang kehidupan mereka ditanggung oleh perusahaan. Alasan ketiga lebih bersifat biologis. Disebutkan bahwa perkawinan suami-istri Belanda di Hindia ternyata sering mandul. Keguguran dan kematian anak-anak lazim terjadi. Anak-anak yang lahir lemah secara fisik. Pengaruh iklim yang berbeda antara Eropa dengan Asia menjadi penyebabnya (Stoler, 2010:48-49).

Dengan alasan-alasan tersebut *Heeren XVII* kemudian lebih menganjurkan praktik pergundikan, dengan harapan akan mempermudah proses akulturasi. Pejabat kompeni dengan

mudah bisa mempelajari adat istiadat, kebiasaan, dan bahasa pribumi: untuk menyingkap selubung dunia timur yang misterius sedikit demi sedikit. Penguasaan dunia Timur yang penuh misteri ini akan mempermudah aktivitas perekonomian yang tentunya menguntungkan perusahaan. Jadi, melalui institusi ini kebutuhan biologis dapat dipenuhi dan keuntungan ekonomi dapat ditingkatkan. Selain itu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Eropa-Asia ini mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat, di mana mereka inilah yang melanjutkan bisnis perusahaan.

Demikian, karena alasan ekonomi dan politik, maka praktik pergundikan menjadi lumrah. Tapi "legalitas" praktik ini hanya bertahan dua abad. Sebab pada abad ke-19 orang mulai menentangnya (Stoler, 1996). Pada tahun 1856, W. L. Ritter menulis:

"Apa yang kami maksud di sini adalah, apa yang kami akui secara terang-terangan, kehidupan bersama antara seorang (laki-laki) Eropa dengan perempuan Pribumi, cukup banyak, dan bukan tanpa dasar, sebuah duri di mata, yang dalam beberapa situasi sangat sulit untuk dihilangkan dan diubah. Kami sama sekali tidak ingin menjadi pendukung kehidupan seperti itu – [kami] sangat jauh dari itu; juga kami sangat senang bahwa dalam praktik itu (saat ini) sudah mengalami penurunan (Ritter, 1856:19).

Kesaksian yang berasal dari pertengahan abad ke-19 ini menegaskan perubahan cara bagaimana orang Eropa memandang praktik pergundikan. Perubahan ini rupanya terkait erat dengan keberadaan negara kolonial Hindia Belanda yang semakin mapan di tanah jajahan dengan jumlah orang Eropa *totok* yang semakin meningkat. Sebab, sebagai sebuah negara, otoritas kolonial mulai melihat tubuh sebagai sumber daya. Karena itu, kualitas individu menjadi sesuatu yang penting

untuk dibahas. Nah, karena kualitas individu ditentukan di dalam reproduksi, persoalan seksualitas pun menjadi penting dibahas.

Pergundikan, misalnya, dianggap akan melahirkan individu-individu berkualitas buruk. Sebab kelompok orang yang sering disebut sebagai "Indo" ini merupakan tempat berkumpulnya dua sifat buruk, dari orang Eropa dan orang Pribumi (Baay, 2010:84). Itulah kenapa jenis manusia ini dianggap sebagai merugikan. Kenyataan bahwa mereka sering dianggap sebagai makhluk bertubuh Eropa tapi bermoral pribumi juga bentuk ancaman lain, yakni ancaman terhadap superioritas ras Eropa. Selain itu, dari sisi ekonomi, hidup bersama gundik ini dianggap penghamburan. Sebab para lelaki Eropa harus menghidupi mereka, yang sering kali gaya hidupnya boros.

Pandangan-pandangan moralis ini menjadi lebih banyak lagi jumlahnya pada awal abad ke-20. Pada tahun 1900, Bas Veth, mengatakan, dalam bukunya yang memicu perdebatan – *Het leven in Nederlandsch-Indië* – bahwa "Hindia adalah rumah sakit bagi penderita degenerasi moral" (Veth 1900:2). Bas Veth adalah seorang pedagang dan telah tinggal selama bertahun-tahun di Hindia Belanda. Sebagai seorang pedagang, ia lebih sering tinggal di kota-kota besar seperti Makassar dan Surabaya; ia tidak pernah benar-benar melihat kehidupan di Hindia dari dekat. Itulah kenapa pandangannya terhadap Hindia menjadi penuh kebencian, terutama ia membenci orang-orang Eropa yang tinggal di sana karena dianggap telah mempraktikkan kehidupan yang amoral (Nieuwenhuys, 1999:134).

Sekalipun kritik terhadap pergundikan sudah mulai muncul sejak pertengahan abad ke-19, praktik pergundikan masih tetap berlangsung dan pemerintah masih tetap memandang hubungan seksual sebagai sesuatu yang penting untuk dipenuhi. Tampaknya pendapat ini dibangun berdasarkan sudut pandang yang maskulin sebab hanya

mementingkan kebutuhan seksual laki-laki. Para pendukung gagasan ini juga menunjukkan bahwa di tanah jajahan kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual mengalami peningkatan akibat pengaruh dari iklim yang panas. Van Der Burg, dokter yang terkenal di Hindia Belanda pada abad ke-19 itu, mengatakan bahwa “tidak diragukan bahwa sementara libido mengalami peningkatan di dalam iklim panas, para lelaki Eropa sering mengalami kesulitan mendapatkan perempuan pribumi yang sehat, kuat dan selalu tersedia” (Burg, 1884:348–349).

Dalam kondisi ini, mengabaikan kebutuhan seksual ini bisa mengakibatkan efek yang buruk. Para laki-laki dikhawatirkan akan mengganggu perempuan baik-baik. Kemudian, fenomena masturbasi atau praktik tidak normal lainnya seperti bersikap binal dan laku semburit akan menjadi demikian lumrah (Hesselink 1987). Menurut Zeger de Beijl, praktik ini dianggap sebagai “*the truly devilish teasing that ascribes abstention from sexual intercourse to other sins*” (dalam Hesselink, 1987:208). Di atas semua itu, laku selibat juga bukan solusi dan harus dihindari, sebab dianggap berbahaya buat kesehatan. Demikian, di satu sisi kebutuhan seksual harus dipenuhi, tapi di sisi lain terus direpresi (Hesselink, 1987:208).

Untuk sebuah institusi yang sudah lama dipraktikkan, sejak akhir abad ke-19 dan terutama awal abad ke-20, kemudian mendapat status baru. Ia lebih sering dilihat dari perspektif moral, yakni hubungan seksual antara dua ras yang dilakukan di luar institusi pernikahan. Pada awalnya, pergundikan lebih disarankan karena akan memberi kemudahan kepada para pegawai kolonial untuk melakukan eksploitasi ekonomi. Di awal abad ke-20, penilaian moral lebih banyak mendominasi, seperti yang bisa dibaca dari pengamatan Van Kol tadi. Perubahan penilaian ini juga bisa dilihat dalam pengaturan pelacuran.

2. Pengaturan Pelacuran dan Ambisi Negara Kolonial

Munculnya peraturan tentang pelacuran pada 1852 merupakan salah satu ikhtiar pemerintah kolonial untuk menjawab persoalan seksualitas. Pelacuran dianggap sebagai ruang yang paling efektif bagi para lelaki Eropa, terutama para tentara, untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Tapi karena praktik ini memunculkan bahaya lain, seperti penyakit kelamin, maka pemerintah harus menjamin kesehatan para pelacur itu sendiri. Dengan adanya peraturan ini seluruh pelacur akan mendapat pengawasan dan harus mendapat pemeriksaan rutin oleh dokter yang ditugaskan oleh negara (Abalihin, 2003:86–89).

Karena tujuan utamanya adalah untuk kepentingan laki-laki (Eropa), maka objek utama dalam peraturan ini adalah perempuan, para pelacur. Dalam beberapa pasal memang disebut juga pengawasan terhadap para pengelola rumah pelacuran. Hanya saja, sebetulnya, para pelacurlah yang menjadi sasaran dalam peraturan itu. Ini terkait dengan apa yang harus dimiliki oleh seorang pelacur: kartu sehat dari dokter. Selain itu, para pelacur juga diharuskan berafiliasi ke rumah bordil tertentu. Tanpa dua hal tadi, seseorang perempuan yang berprofesi pelacur dianggap melanggar. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2001:1–13).

Peraturan pelacuran ini memang cukup komprehensif dalam melakukan pengawasan. Setidaknya hal itulah yang tampak dari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Namun, tentu saja peraturan ini tidak luput dari kritik, terutama soal efektivitasnya di lapangan. Untuk itulah pemerintah merasa perlu melakukan penelitian pada 1871, dua dasawarsa setelah pemberlakuannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan ini cukup efektif di beberapa tempat, sedang di tempat lain sebaliknya. Efektivitas ini diukur berdasarkan jumlah pelacur jalanan yang masih beroperasi. Sebab meskipun sudah ada banyak rumah bordil yang

terdaftar, sebagian besar perempuan masih berpraktik di jalanan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, distribusi obat-obatan untuk perawatan perempuan yang sudah tertular sangat kurang, begitu pula dengan jumlah rumah sakit tempat perawatan dan jumlah dokter untuk melakukan pemeriksaan (Jaelani, 2011:59–60).

Kohlbrugge menceritakan pengalamannya sebagai seorang dokter di Hindia Belanda dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 1903. Dalam tulisannya, dia memberi penekanan soal jam kerja seorang dokter. Demikian, katanya, pada hari Senin dia harus melakukan perjalanan sejauh 13 ½ palen (kurang lebih 22 km) untuk memeriksa 60 pelacur; Rabu pagi, bepergian sejauh 19 palen (31,5 km) untuk memeriksa 70 pelacur, Jumat pagi sejauh 24 palen (40 km) untuk memeriksa 30 pelacur, Sabtu pagi sejauh 27 palen (44 km) untuk memeriksa 20 pelacur. Terakhir, di hari Minggu, dia memeriksa 30 pelacur di rumahnya. Untuk perjalanan ini dia harus menyewa kuda dengan harga yang sangat mahal: untuk jarak 83,5 palen, dia harus membayar f 3750 setiap tahunnya. Alhasil dia pun merasa bahwa kedatangannya ke Hindia Belanda hanya untuk menjadi dokternya para pelacur. Kenyataan bahwa setelah adanya pemeriksaan yang kemudian memberi jaminan kesehatan seorang pelacur para lelaki Eropa dan terutama para tentara memanfaatkan pelayanan mereka, dia pun semakin merasa bahwa pekerjaannya lebih cocok disebut sebagai penjaga kesehatan rumah bordil (Kohlbrugge, 1903:310–311).

Kisah tersebut semakin menegaskan bahwa penerapan peraturan tentang pelacuran ini lebih dimaksudkan untuk memberi jaminan kesehatan buat para lelaki pengguna jasa pelayanan perempuan pelacur. Hanya saja apa yang sedianya diharapkan tidak sepenuhnya dicapai. Sebab penyebaran penyakit kelamin terus mengalami peningkatan.

Di Cimahi, kata W.G. de Freytag, Direktur Departemen Kesehatan itu,

perempuan yang berprofesi sebagai pelacur secara sembunyi-sembunyi, telah menularkan penyakit kelamin kepada para serdadu, di dalam maupun di luar rumah bordil. Pasalnya, semenjak jumlah perempuan di rumah bordil berkurang, para serdadu itu sering pergi ke kampung-kampung untuk dan memenuhi kebutuhan seksualnya dengan perempuan pelacur yang tidak berada di bawah pengawasan. Alhasil, ketika mereka kembali berkunjung ke rumah bordil, mereka pun menularkan penyakitnya kepada perempuan-perempuan di sana. Selain itu, perempuan penghuni rumah bordil sendiri terkadang suka bepergian ke kampung-kampung sekitar, menghabiskan satu dua hari di sana. Karena itulah mereka pun terkadang melewatkan pemeriksaan dokter. Itulah kenapa sering kali kontrol kesehatan terhadap mereka dianggap kurang efektif. Hal itu pulalah yang menjelaskan kenapa jumlah penderita penyakit kelamin di kalangan militer di tangsi Cimahi terus mengalami peningkatan.

Menurutnya juga, salah satu cara yang mungkin ditempuh untuk menekan jumlah penyebaran yang semakin meningkat ini, bisa dilakukan dengan mengintensifkan waktu pemeriksaan. Kalau sebelumnya pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sekali seminggu, maka sebaiknya dilakukan dua kali. Hal itu dilakukan untuk menghindari mangkirnya para perempuan dalam pemeriksaan kesehatan.

Hanya saja,

“bersama kepala bagian kesehatan Cimahi kami sudah bersepakat, bahwa sebaik-baiknya cara untuk mengurangi penyebaran penyakit kelamin adalah dengan menghidupkan kembali praktik pergundikan” sebab menurutnya “di Batalion 9 dan 4 yang serdadunya banyak memiliki gundik, penularan penyakit kelamin lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang terjadi

di Batalion 15” (Minister van Kolonien, 1905).¹

Laporan Direktur Departemen Kesehatan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dari 20 Juni sampai 2 Agustus 1901. De Freytag, sang direktur, mungkin termasuk orang yang penasaran terkait efektivitas penerapan peraturan tentang pelacuran. Kemudian, Departemen Kesehatan yang pada dasawarsa pertama abad ke-20 masih menjadi bagian dari Departemen Militer, cukup bisa dimengerti kalau penelitiannya pun bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penyebaran penyakit kelamin di kalangan militer.

Ada dua hal, setidaknya, yang bisa dilihat dari penelitian ini. Pertama, penelitian yang berfokus kepada militer ini semakin menegaskan pendapat bahwa menjaga kesehatan dan kebugaran para serdadu adalah kewajiban utama di tanah koloni. Sebab bagaimanapun, keberlangsungan kekuasaan kolonial di tanah jajahan juga sedikit banyak didukung oleh peran militer. Hal ini terutama berlaku lebih intensif sejak akhir abad ke-19, saat ketika penguasa kolonial sedang berkeinginan untuk melakukan banyak ekspedisi ke daerah-daerah yang belum banyak terjamah. Kedua, laporan itu semakin menegaskan bahwa peraturan pelacuran tidak memberi banyak efek untuk menekan penyebaran penyakit kelamin. Sebab, dalam laporan ini juga dibahas kota-kota lain, dan hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Cimahi.

¹*met den Eerstaanwezend officier van gezondheid te Tjimahi ben ik van meening, date en der beste middelen om het aantal lyders aan venerische ziekten en syphilis onder de militairen te doen afnemen, altyd zal blyven het aanmoedigen om huishoudster te nemen [...]* by het 9de en 4de Bataljon, waar meer soldaten een huishoudster hebben dan bij het 15de Bataljon, kwamen dan ook in 1900 venerische ziekten minder voor.

Wajar saja kalau tentangan terhadap pemberlakuan peraturan ini semakin keras disuarakan. Haga, seorang dokter dari dinas kesehatan, menulis sebuah artikel yang cukup galak mengkritik penerapan peraturan pelacuran. Dalam artikel yang berjudul “*De Schaduwezijden van het Reglement op de Prostitutie in Nederlands-Indie*” [Sisi Gelap dari Peraturan Pelacuran di Hindia Belanda] (Haga, 1901) sang dokter mengatakan bahwa peraturan itu sangat tidak efektif. Pertama, sekalipun peraturan itu mengharuskan semua perempuan pelacur terdaftar, masih banyak di antara mereka yang tidak terdata dan bekerja secara sembunyi-sembunyi. Alhasil, jumlah yang tercatat oleh polisi lebih sedikit dibanding dengan jumlah pelacur sesungguhnya. Kedua, beban berat seorang dokter yang terkadang harus memeriksa 100 pelacur setiap hari membuat hasil diagnosanya kurang meyakinkan. Seorang dokter, karenanya, harus bekerja lebih dari delapan jam hanya untuk melakukan pemeriksaan para perempuan pelacur ini. Terakhir, ruang sempit dengan sedikit cahaya membuat proses pemeriksaan kurang maksimal. Sebab kondisi itu telah memungkinkan para perempuan yang akan diperiksa ini menyamarkan simtom penyakit yang dideritanya.

Kritik Haga ini kemudian dipertajam oleh Ruitenbach dalam sebuah artikel yang terbit tujuh tahun setelah tulisan Haga dipublikasikan. Ada dua alasan utama yang menjadi keberatannya: ruang lingkup yang terlalu luas membuat peraturan ini sulit untuk ditetapkan; tim yang terlibat dalam persoalan ini tidak banyak. Berangkat dari kritik ini, dia malah menyarankan supaya orang kembali mempraktikkan pergundikan. Untuk zamannya, gagasan ini agak mundur, karena berarti menganjurkan pemerintah untuk kembali melegalkan institusi yang setengah abad sebelumnya mendapat banyak kecaman sebagai sebetulnya laku amoral. Tapi menurutnya, pergundikan ini merupakan jalan yang paling tepat untuk mengatasi persoalan

penyakit kelamin dan pemenuhan kebutuhan seksual (Ruitenbach, 1908:47).

Suara-suara yang kemudian muncul lebih merupakan kecaman. Disebutkan bahwa pemerintah dianggap telah melegalkan kemaksiatan. Selain itu dikatakan juga bahwa pemerintah bersekutu dalam laku mengumbar nafsu.

Kritik terhadap pengaturan praktik pelacuran tentu saja tidak hanya terjadi di Hindia Belanda. Di Perancis, tempat di mana peraturan pertama kali diterapkan, perdebatan antara yang setuju menentang juga demikian sering. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh *Société d'anthropologie de Paris*, misalnya, Després mengemukakan permasalahan terkait penurunan jumlah penduduk akibat menurunnya kemampuan reproduksi seorang perempuan. Hal ini disebabkan oleh perilaku seksualitas dari perempuan itu sendiri. Menurutnya

“seorang perempuan yang menikah akan memiliki lebih banyak anak dibanding dengan perempuan yang hidup sebagai gundik; seorang gundik akan memiliki lebih banyak anak dibanding seorang perempuan yang menjadi pelacur berkala; seorang pelacur jalanan akan memiliki lebih banyak anak dibanding pelacur di rumah bordil” (Després, 1877:159–160).²

Kenyataan bahwa yang terakhir biasa melayani banyak laki-laki dalam satu harilah yang membuat kemampuan reproduksinya tidak berfungsi.

²*les femmes mariées, bien qu'il y ait des mariages stériles à cause de la disproportion d'âge et d'unions contractées en vue de la fortune et en dépit d'infirmités, ont plus d'enfants que les femmes qui vivent en concubinage; que les concubines ont plus d'enfants que les femmes qui se prostituent d'une manière intermittente, c'est-à-dire changeant de relations tous les mois ou tous les ans; que ces prostituées clandestines par occasion ont plus d'enfants que les prostituées inscrites.*

Pendapat ini mendapat tanggapan dari peserta diskusi lain. Salah seorang di antaranya berpendapat bahwa sekalipun pengaturan pelacuran sangat berisiko untuk membuat para perempuan menjadi steril yang berakibat pada penurunan angka kelahiran, pelacuran jalanan juga akan menyebarkan penyakit yang membuat penduduk lemah. Menurutnya, dari segi kesehatan, pengaturan lebih diutamakan. Sebab dugaan bahwa praktik pelacuran yang diatur akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk belum benar-benar terbukti. Perdebatan yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19 ini juga berpusat pada penyelamatan tubuh yang produktif. Demikian, di dalam suatu masa yang melihat tubuh sebagai sumber daya, maka pengurangan jumlah penduduk ini adalah sebuah ancaman (Després, 1877:159–160).

Perdebatan tentang pengaturan praktik pelacuran juga terjadi di negeri Belanda. Jurnal *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)* sejak tahun 1880 memuat sejumlah artikel terkait persoalan ini. Diperkirakan antara tahun 1880 sampai dengan 1900 terdapat kurang lebih 150 artikel yang membahas persoalan pelacuran ini (Prakken, 1973:1043; Lihat juga Jaelani, 2017:119). Sekalipun *NTvG* adalah sebuah jurnal kedokteran, pembahasan pelacuran tidak selalu dilihat dari aspek medis. Menno Huizinga misalnya menulis pada tahun 1881 bahwa tugas seorang dokter adalah menyembuhkan mereka yang sakit. Persoalan apakah sebab penyakitnya adalah karena orang tersebut mempraktikkan gaya hidup amoral, itu berada di luar jangkauan dokter (Huizinga, 1881:95). Upaya penghapusan peraturan tentang pelacuran itu sendiri didukung oleh Nationaal Congres tegen de Prostitutie (Kongres Nasional Anti Pelacuran) yang lebih banyak menyampaikan argumen moral terkait adanya peraturan ini. Sementara itu, para dokter Belanda tetap berpandangan bahwa pencegahan penyebaran penyakit kelamin melalui

pengaturan praktik pelacuran merupakan persoalan kesehatan masyarakat (Jaelani, 2017:119).

Di Hindia Belanda, pada akhirnya pengaturan praktik pelacuran dihentikan. Selain karena diberlakukannya undang-undang moral baru di negeri Belanda, kepentingan pemerintah sebagai penjaga moral juga menjadi alasan kenapa peraturan yang melegalkan praktik pelacuran dihapus. Demikian, mulai tanggal 1 Maret 1911, pemeriksaan kesehatan para pelacur dihentikan dan rumah sakit untuk penderita penyakit kelamin ditutup. Dua tahun setelah itu, terhitung sejak 1 September 1913, pemerintah melarang praktik pelacuran dan menghukum setiap orang yang terlibat di dalamnya.

3. Pelacur dan Pemerintah: cerita dari Bandung

Tuan Lunier, salah satu peserta dalam diskusi yang diselenggarakan *Société d'anthropologie de Paris* tersebut, mengatakan bahwa di mana kepadatan penduduk cukup tinggi, maka peraturan pelacuran tidak bisa dihindarkan. Senada dengan ini Tuan Duhousset, peserta lainnya, mengatakan “pelacuran memang merupakan simtom degradasi masyarakat, tapi keburukan ini tidak bisa dihindarkan ketika orang berkumpul dalam jumlah yang besar, terutama di sekitar tangsi militer, perjalanan para tentara, pabrik, begitu pula di sekitar pelabuhan”. Kedua pandangan jelas menunjukan bahwa pelacuran merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kedua pendapat ahli ini juga cukup menegaskan bahwa keinginan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menghapus praktik pelacuran adalah tidak mungkin.

Bandung yang pada saat dihapuskannya peraturan tadi sedang tumbuh menjadi sebuah kota juga disibukkan oleh persoalan pelacuran. Pembentukan Madjoe Kamoelijaan pada 1914, sebuah organisasi yang didirikan untuk memerangi praktik pelacuran,

merupakan bukti betapa persoalan pelacuran kota ini cukup serius (Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera. IXb3: Verheffing van de inlandsche vrouw, 1914). Selain itu, data statistik penderita penyakit kelamin juga menunjukan bahwa kota ini menempati posisi paling tinggi penderita penyakit kelamin dibandingkan dengan kota-kota lain (Simon, 1941:1630–1640).

Wajar saja kalau masyarakat juga banyak menuntut kepada pemerintah supaya melakukan tindakan atas keadaan yang buruk ini. Menanggapi hal ini, pemerintah sendiri juga sering melakukan penangkapan mereka yang dicurigai sebagai pelacur. Dalam hal ini, polisilah yang menjadi ujung tombak pemerintah. Memang terkadang polisi juga suka belaku arogan dengan menangkapi para perempuan yang mereka anggap memiliki gerak gerik yang mencurigakan. Harus diakui, untuk persoalan ini, polisi memang memiliki kewenangan penuh.

Lihat saja pertengkaran yang terjadi antara seorang polisi dengan seorang perempuan yang diduga pelacur. Perempuan yang sedang duduk di atas sado pada malam hari itu tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Kontan sang perempuan pun marah dan menyangkal kalau dirinya adalah seorang pelacur. Tapi polisi tidak begitu saja percaya. Adu mulut antara keduanya pun tidak terhindar; keduanya berpegang pada pendapatnya masing-masing. Wartawan yang melaporkan kejadian ini menjelaskan bahwa sebetulnya alasan dari kecurigaan polisi cukup sederhana: posisi duduk si perempuan yang menempati tempat duduk kusir sado, sedangkan sang kusir duduk di tempat penumpang (*Pertimbangan*, 1916, No. 108).

Memang sepak terjang polisi ini tidak selalu baik. Di masa pelacuran sudah menjadi praktik yang terkekang, mereka yang masih menjalankan bisnis ini secara sembunyi-sembunyi, harus merangkul pihak lain untuk mengamankan

kepentingannya. Karena polisi pada masa itu merupakan ujung tombak dalam permasalahan ini, merangkul mereka seperti menjadi keharusan. Maka, tidak mengherankan kalau pada waktu itu polisi juga dianggap turut mengembangkan praktik pelacuran. Bahkan, dari pihak polisi, bukan mantri polisinya saja yang terlibat, melainkan juga kepalanya. Dalam mingguan *Pertimbangan* (1917, No. 49) diberitakan bahwa agen-agen polisi ini demikian rajin keluar masuk tempat pelacuran. Mereka, selain menjadi pelindung, juga ada yang sekaligus menjadi pelanggan.

Terkait dengan perlindungan rumah pelacuran, seorang pejabat pribumi juga ada yang melakukan itu. Lurah Astanaanyar, misalnya, selain menjadi pejabat negara, dia juga menjadi pengelola dan pemberi perlindungan rumah pelacuran. Pemberitaan mengenai sepak terjang lurah ini pun sering ditulis di dalam surat kabar. Tapi memang, sang lurah ini cukup cerdas. Untuk menutupi keterlibatannya, lurah ini sesekali melakukan razia. Laki-laki yang datang ke wilayahnya untuk mencari perempuan, ia tangkap. Hanya saja dalam pekerjaannya itu sering kali ia berlaku tidak adil. Misalnya, dalam melakukan penangkapan, ia tidak menangkap semua lelaki yang datang ke tempatnya. Lelaki Eropa ia biarkan saja berkeliaran mencari perempuan di daerahnya. Sementara itu, jika orang pribumi atau Tionghoa yang datang dengan gagah ditangkapnya “seperti menangkap capung di sawah” tulis sebuah harian. Begitu pula dengan apa yang dilakukan seorang *lebe* dari Karanganyar. Selain mengurus agama, nikah, zakat, dan fitrah, *lebe* ini juga mempunyai pekerjaan sebagai kepala pelacur. Pekerjaannya yang terakhir ini memang telah memberi banyak keuntungan ketimbang hanya mengurus agama saja (*Pertimbangan*, 1917, No. 32).

Keberadaan tempat pelacuran yang terselubung sangat sulit untuk diidentifikasi. Apalagi sampai menjeratnya

dengan hukum. Tanggapan masyarakat yang menginginkan supaya praktik pelacuran diberantas sulit dipenuhi, karena sering kali tidak diiringi dengan penyebutan lokasi. Akan tetapi sekalipun tempat itu telah diketahui oleh banyak orang sebagai tempat pelacuran, tetap saja pemerintah kesulitan menjeratnya, karena secara kasat mata tidak melakukan hal-hal yang dikategorikan pemerintah sebagai pelacuran. Belum lagi aparat yang bertugas, ternyata ikut menjadi pelindung lokasi pelacuran.

D. PENUTUP

Sikap pemerintah terhadap praktik seksualitas ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Anjuran pergundikan lebih ditujukan untuk keuntungan ekonomi, sementara larangan pergundikan, selain karena alasan ekonomi juga karena alasan politik. Begitu pula terhadap pelacuran: legalitas dan illegalitasnya ditentukan oleh persoalan ekonomi dan politik. Jelas, dari kedua hal itu, menjaga kepentingan pemerintah kolonial di tanah jajahan berada di atas segalanya.

Temuan di atas merupakan sebuah sumbangan untuk kajian sejarah kolonial yang sebagian besar masih memberi banyak penekanan dalam kajian sejarah sosial, politik, dan ekonomi. Melalui persoalan seksualitas, tulisan ini bisa menampilkan kompleksitas persoalan yang terjadi dalam sebuah negara kolonial.

Kasus serupa bisa ditemukan dalam persoalan pengaturan opium di Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mulai menerapkan monopoli atas perdagangan candu di Hindia Belanda. Sebelumnya, perdagangan ini, mulai dari pertanian sampai ke penjualannya, didominasi oleh orang-orang Tionghoa. Atas alasan kontrol terhadap penjualan yang liar, maka pemerintah pun ikut andil dalam penjualan candu dengan tujuan supaya lebih bisa mengawasi distribusi dan konsumsi candu yang bisa membahayakan masyarakat (Wahid, 2013: 153–160).

Kasus candu, dengan demikian, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada persoalan pergundikan dan pelacuran. Sikap moral pemerintah kolonial, selalu berada dalam tegangan antara menjaga kewibawaan pemerintah yang beradab dan menyelamatkan kepentingan ekonomi dari praktik kolonialisme.

DAFTAR SUMBER

1. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis

- Abalahin, Andrew Jimenez. 2003. *Prostitution Policy and the Project of Modernity: A Comparative Study of Colonial Indonesia and the Philippines, 1850-1940*. Graduate School, Cornell University.
- Bertrand, Romain. "La « Politique Éthique » Des Pays-Bas à Java (1901-1926)". *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2007, 93(1): 115–138.
- Boomgaard, Peter. "The Welfare Services in Indonesia, 1900–1942". *Itinerario*, 1986, 10 (01): 57.
- Comaroff, John L. "Reflections on the Colonial State, in South Africa and Elsewhere: Factions, Fragments, Facts and Fictions". *Social Identities*, 1988, 4 (3): 321-361.
- Després, A. "Sur La Prostitution Réglementée et Ses Rapports Avec La Dépopulation". *Bulletins de La Société d'anthropologie de Paris*, 1877, 12 (1): 158–166.
- Haga, J. "De Schaduwezijden van Het Reglement Op de Prostitutie in Nederlandsch-Indie". *Geneeskundig Tijdschrift Voor Nederlandsch-Indie*, 1901, (41): 531–538.
- Huizinga, J. Menno. "Wettelijke Bestrijding Der Syphilis", *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde*, 1881: 93–98.
- Jaelani, Gani A. 2011. *Les maladies vénériennes dans la société javanaise sous l'administration coloniale 1812-1942*. Université de La Rochelle.
- _____. 2017. *La Question de l'hygiène Aux Indes-Néerlandaises: Les Enjeux Médicaux, Culturels et Sociaux*. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- Kohlbrugge, J.F.H. "Ervaringen van Een Indisch Geneesheer", *Vragen Des Tijds*, 1903, 2(29): 309–346.
- Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera. IXb3: Verheffing van de inlandsche vrouw*. 1914. Batavia: Kolff.
- Prakken, J. R. "Hygienisten En Moralisten Bij de Geslachtsziektenbestrijding in de Negentiende Eeuw", *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde*, 1973: 1042–1049.
- Ministervan Kolonien, 11 Mei 1905 "RapportvandeInspectie, gehouden door den Chefvanden Geneeskundigen Dienst over de Voornamste Militaireziekeninrichtingen in de Iste, IIde Militaire Afdeeling op Jawa, vanaf 20 Juni totenmet 2 Augustus 1901.
- Ruitenbach, D.J. "De Regelementeering van Prostitutie in Indie", *Indische Gids*, 1908: 33–47.
- Simon, R.D.G. Ph. "Het Onrustbarende Aantal Geslachtsziekten En de Nood Zakelijkheid Eener Social-Hygenische Bestrijding Hiervan in Nederlandsch-Indie", *Geneeskundig Tijdschrift Voor Nederlandsch-Indie*, 1941: 1630–1640.
- Suryakusuma, Julia I. "Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pengantar Teoretis", *Prisma*, 1991, XX (7): 3–14.
- Wahid, Abdul. 2013. *From Revenue Farming to State Monopoly*: Universiteit Utrecht.

2. Buku

- Alatas, Hussein. 1977. *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism*. London: F. Cass.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2001. *Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial. Penerbitan Naskah Sumber*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Baay, Reggie. 2010.
Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bloembergen, Marieke. 2009.
Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan. Jakarta: Kompas.
- _____. 2011.
"Being clean is being strong: Policing cleanliness and gay vices in the Netherlands Indies", dalam Kes van Dijk dan Jean Gelman Taylor *Cleanliness and Culture*. Leiden: KITLV.
- Blussé, Leonard. 2004.
Persekutuan aneh : pemukim Cina, wanitaperanakan, dan Belanda di Batavia VOC. Yogyakarta: LKIS.
- Burg, C. L. van der. 1884.
De Geneesheer in Nederlandsch-Indië: Land, klimaat en bewoners ; "hygiène ; de uitoefening der geneeskundige praktijk, vol.1. Batavia: Ernst and Co.
- Hesselink, Lisbeth. 1987.
"Prostitution: A Necessary Evil, Particularly in the Colonies: Views on Prostitution in the Netherlands Indies", dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof *Indonesian Women in Focus : Past and Present Notions*. Dordrecht, Holland; Providence, USA: Foris Publications.
- Kol, H. H. van. 1903.
Uit onze Koloniën: Uitvoerig Reisverhaal. Leiden: Sijthoff.
- Marrou, Henri Irénée. 1975.
De la Connaissance Historique. Points Histoire. Paris: Édition du Seuil.
- Nieuwenhuys, Rob. 1999.
Mirror of the Indies. Hong Kong: Periplus.
- Ritter, W. L. 1856.
De Europeaan in Nederlandsch Indië. Leyden: Sythoff.
- Stoler, Ann L. 2010.
Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. California: University of California Press.
- Stoler, Ann L. 1996.
"Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender, Race, and Morality in Colonial Asia", dalam Joan Wallach Scott *Feminism and History*. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Veth, Bas. 1900.
Het leven in Nederlandsch-Indië. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon.
- Veyne, Paul. 1979.
Comment on Écrit l'histoire. Points Histoire. Paris: Edition du Seuil.

3. Surat Kabar dan Majalah

- Pertimbangan*, 1916, No. 6, 108, 110, th. I
_____, 1916, No. 116, 122, th. I
_____, 1917, No. 5, 12, 27, th. II
_____, 1917, No. 32, 33, 49, th. I

